



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2023**

**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Dinas Peternakan dan Perikanan
Tahun 2023**



KATA PENGANTAR

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pemerintahan Pusat maupun Daerah (Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Guna mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Berikut ini disampaikan LAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.

LAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis merupakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan perjanjian kinerja, hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas termasuk didalamnya keberhasilan atau kegagalan serta permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program/kegiatan.

LAKIP ini menyajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan SKPD yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi anggaran.

Hasil dari penyusunan LAKIP Tahun 2023 diharapkan menjadi bahan masukan bagi penentuan kebijakan dalam melanjutkan sasaran, program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIAMIS**



Drs. CIYATNO. S.IP. M.Si

NIP. 19730813 200212 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Permintaan kebutuhan pangan berupa protein hewani semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Untuk itu diperlukan protein hewani yang HAUS (Halal, Aman, Utuh dan Sehat) dan terjamin kualitas gizinya. Daging, telur dan ikan merupakan sumber protein hewani yang menjadi pilihan masyarakat pada umumnya. Untuk itu ketersediaan daging, telur dan ikan harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius dan nyata. Protein hewani ini harus dapat ditingkatkan dari segi kualitas, kuantitas maupun keanekaragamannya, sehingga dapat menjaga stabilitas harga di pasar dan terhindar dari kelangkaan di pasar.

Peningkatan kebutuhan tersebut dapat memberdayakan dan menggerakkan perekonomian masyarakat dalam kegiatan peternakan dan perikanan. Selain itu, dapat menciptakan lapangan usaha di masyarakat, juga menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berikut ini disampaikan LAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis bersumber dari retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Ciamis dan Banjarsari sebesar Rp. 32.225.000,00. Retribusi Pasar Hewan Ciamis, Rancah, Rajadesa, Panjalu, Lakbok, Pamarican, Banjarsari, Purwadadi) sebesar Rp. 26.956.000,00. Retribusi enam Pasar Ikan (Imbanagara, Cihaurbeuti, Golat, Maleber, Banjarsari dan Kawali) sebesar Rp. 34.000.000,00. Jumlah total keseluruhan PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 93.181.000,00. Adapun realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp. 58.050.000,00 atau mencapai 62,30%.

Berdasarkan sumber anggarannya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Pencapaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	APBD Kab. Non Urusan	1 Program 6 Kegiatan 23 Sub Kegiatan	8.379.634.698	7.632.957.251	91,09	746.677.447
2	APBD Kab. Urusan Pilihan	6 Program 11 Kegiatan 15 Sub Kegiatan	10.016.814.400	9.572.661.990	95,57	444.152.410
3	APBD Prov.	3 Program 4 Kegiatan	PM	PM	100	-
4	APBN	4 Program 7 Kegiatan	PM	PM	100	-

Sisa anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi tahun 2023 yang berasal dari efisiensi sisa kontrak.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar Rp. 18.396.449.098,00. Realisasi Belanja Daerah secara keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 17.205.619.241,00 atau mencapai 93,52%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.190.829.857,00.

PAD Tahun 2023 untuk Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis sampai 29 Desember 2023 ditargetkan sebesar Rp. 93.181.000,00. Target PAD tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan PAD tahun 2022. Realisasi PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mencapai Rp. 58.050.000,00 atau mencapai 62,30%.

Capaian realisasi produksi ternak dan ikan di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, sehingga dapat memenuhi target Perjanjian Kinerja 2023. Prestasi ini membanggakan dan akan terus ditingkatkan sesuai dengan target Perjanjian Kinerja tahun berikutnya. Terutama untuk kooditas unggulan seperti daging, telur, ikan nila dan ikan mas. Selain itu, kedepan sarana dan prasarana untuk mendukung produksi ternak dan budidaya ikan akan ditambah guna menunjang peningkatan produksi dan produktivitas ternak dan ikan sehingga akan berdampak langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan di Kabupaten Ciamis.

Masalah pokok yang berpengaruh pada kinerja kegiatan dalam mencapai sasaran di Kabupaten Ciamis diantaranya keterbatasan jumlah

tenaga teknis, medis dan paramedis yang menangani masalah peternakan dan perikanan; belum terdatanya usaha pengolahan Pangan Asal Hewan (PAH) dan Ikan, tempat pemotongan hewan dan unggas skala kecil, pasar yang menjual PAH, olahan PAH dan ikan di Wilayah Kabupaten Ciamis; menurunnya produksi ikan di perairan umum; serta serangan penyakit ikan disebabkan oleh fluktuasinya suhu perairan dan curah hujan yang tinggi, terbatasnya jumlah maupun mutu induk unggul.

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian termasuk lahan perternakan (lahan penggembalaan) dan perikanan (kolam ikan) yang menyebabkan semakin menurunnya lahan pertanian di wilayah Kabupaten Ciamis. Untuk itu pembangunan wilayah Kabupaten Ciamis haruslah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah dicanangkan dengan harapan meski lahan peternakan dan perikanan semakin berkurang namun produksi dan produktivitas ternak dan ikan dapat ditingkatkan dengan cara intensifikasi dan introduksi teknologi secara tepat guna.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. GAMBARAN UMUM DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1
I.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
II.1. VISI DAN MISI	16
II.1.1. VISI	16
II.1.2. MISI	17
II.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	18
II.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	20
II.3.1. STRATEGI	20
II.3.2. KEBIJAKAN	20
II.4. PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
a. Target dan Realisasi Tahun 2023	24
b. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023	25
c. Analisis Permasalahan dan Solusi Pencapaian Target Kinerja	27
d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja dan Capaian Sasaran Strategis	28
III.2 REALISASI ANGGARAN	35
III.2.1. REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	35
III.2.2. REALISASI PENDAPATAN DAERAH	46
III.2.3. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	49
BAB IV PENUTUP	53
LAMPIRAN	55



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Perjanjian Kinerja 2023	22
2. Program dan Kegiatan 2023.....	23
3. Permasalahan dan Solusi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2023	28
4. Target dan Realisasi Produksi Daging Tahun 2023	30
5. Target dan Realisasi Produksi Ikan Tangkap Tahun 2023	33
6. Target dan Realisasi Produksi Ikan Budidaya Tahun 2023	34
7. Target Penerimaan PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis	47
8. Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2023	48
9. Realisasi Belanja Langsung	52

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Realisasi Produksi Daging Tahun 2022 dan 2023	25
2. Realisasi Produksi Telur Tahun 2022 dan 2023	26
3. Realisasi Produksi Ikan Tangkap Tahun 2022 dan 2023	27
4. Realisasi Produksi Ikan Budidaya Tahun 2022 dan 2023	27
5. Persentase Penerimaan PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2023	49
6. Persentase Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2023	51

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2023	56
2. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2023	57

I. PENDAHULUAN

I.1 GAMBARAN UMUM DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, letaknya berada di ujung Tenggara Provinsi Jawa Barat, yang jaraknya dari ibukota Provinsi sekitar 121 km. Posisi geografis Kabupaten Ciamis berada pada koordinat 108^o 19' sampai dengan 108^o 43' Bujur Timur dan 7^o 03' 39" sampai dengan 7^o 39' 36" Lintang Selatan. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis – Cirebon – Jawa Tengah. (Sumber : P-RPJMD Kab. Ciamis, 2019 - 2024).

Kabupaten Ciamis yang terdiri dari 27 Kecamatan memiliki potensi kekayaan dan keanekaragaman hayati berupa sumber daya peternakan dan perikanan. Komoditas unggulan dari budidaya peternakan antara lain Sapi Pasundan, Ayam Sentul, Ayam Ras Pedaging, Ayam Ras Petelur dan domba. Sedangkan komoditas unggulan dari budidaya ikan air tawar antara lain Gurame, Nila dan Udang Galah. Potensi daerah tersebut haruslah dikelola dengan arif dan bijaksana guna memberikan hasil yang optimal. Diperlukan peran serta aktif dari instansi pemerintah agar dapat mengatur, mengarahkan dan memberikan dorongan yang tepat dan sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Ciamis.

Pembangunan sektor peternakan dan perikanan dititikberatkan pada usaha petani ternak dan ikan yang berwawasan agribisnis dalam upaya peningkatan perekonomian di pedesaan dengan tetap memprioritaskan peningkatan produksi protein hewani asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) sebagai bahan konsumsi masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat yang positif terhadap setiap langkah pelaksanaan pembangunan peternakan dan perikanan sehingga dapat mengembangkan potensi daerah yang ada. Potensi daerah tersebut diharapkan dapat memunculkan komoditas unggulan yang menjadi sentra pengembangan ternak dan ikan.

Pembangunan peternakan dan Perikanan di Kabupaten Ciamis memiliki potensi yang menjanjikan, hal ini ditunjang dengan kondisi

berikut :

- Modal dasar berupa sumber daya alam, dengan kondisi iklim yang kondusif serta lahan garapan yang masih luas.
- Sumber daya manusia, penduduk Kabupaten Ciamis tenaga kerja produktif cukup banyak dan melimpah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 – 2031, dibagi menjadi :

- a. Kawasan Peruntukkan Peternakan (rumpun pertanian), meliputi:
 - Sentra pengembangan sapi potong tersebar di Panumbangan, Panjalu, Sukamantri, Rancah Tambakasari, Pamarican dan Sadananya;
 - Sentra pengembangan ternak besar sapi perah, dengan lokasi di Kecamatan Cikoneng, Panjalu, Cihaurbeuti, dan Sidangkasih;
 - Sentra pengembangan ternak domba dan kambing tersebar di Panjalu, Lumbung, Rajadesa, Cimaragas, Banjarsari, Pamarican, Panawangan, Cihaurbeuti, Cidolog, Lakbok dan Sukadana;
 - Sentra pengembangan ternak ayam buras tersebar di Ciamis, Cipaku, Cijeungjing, Cikoneng, Sindangkasih, Baregbeg, Rancah, Cisaga dan Sukadana;
 - Sentra pengembangan Ayam Ras Pedaging tersebar di Ciamis, Cipaku, Kawali, Panawangan, Lumbung, Jatinagara, Rajadesa, Rancah, Panjalu, Sukamantri, Panubangan, Cihaurbeuti, Sidangkasih, Cisaga dan Cijeungjing;
 - Sentra Pengembangan Ayam Ras Petelur tersebar di Cisaga, Cipaku, Sukamantri dan Panjalu;
 - Sentra Pengembangan Itik tersebar di Lakbok, Purwadadi, Panumbangan;
 - Penyediaan pakan, dengan lokasi di Kecamatan Ciamis, Sadananya, Cikoneng, Cihaurbeuti, Banjarsari, Cijeungjing, Panjalu, Kawali, Sidangkasih, Panumbangan, Sukamantri dan Panawangan;
 - Pengolahan hasil peternakan berupa industri pengolahan hasil peternakan, dengan lokasi di Kecamatan Ciamis,

Sadananya, Cikoneng, Cihaurbeuti, Panumbangan, Panjalu, Cijeungjing dan Banjarsari;

b. Kawasan Peruntukkan Perikanan, meliputi:

✓ Perikanan tangkap, terdiri dari:

- Perairan umum rawa, dengan lokasi di Kecamatan Banjarsari, Lakbok, Tambaksari, Rancah, Purwadadi;
- Perairan umum danau atau situ atau cekdam, dengan lokasi di Kecamatan Banjarsari, Pamarican, Cisaga, Tambaksari, Rajadesa, Sadananya, Panawangan, Kawali, Panjalu, Panumbangan, Sindangkasih, Lumbung dan Sukamantri;
- Pemanfaatan danau atau situ, dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan;
- Pemanfaatan cekdam dan perairan umum sungai, dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan;
- Perairan umum sungai, dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan.

✓ Budidaya perikanan terdiri dari:

- Budidaya air tawar kolam air tenang, dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan;
- Budidaya air tawar kolam air deras, dengan lokasi di Kecamatan Ciamis, Cihaurbeuti, Sadananya, Kawali, Panumbangan, Sindangkasih, Baregbeg dan Lumbung;
- Budidaya air tawar mina padi, dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan kecuali Lakbok, Cidolog, Sukamantri.

✓ Pengolahan ikan, industri pengolahan ikan di Kecamatan Banjarsari, Lakbok, Cimaragas, Cisaga, Tambaksari, Ciamis, Cikoneng, Cihaurbeuti, Cipaku, Panjalu, Panumbangan, Sindangkasih, Baregbeg dan Purwadadi.

✓ Penyediaan prasarana perikanan, dengan lokasi di Balai Benih Udang Galah (BBUG) Kecamatan Pamarican, BBI Sukamaju Kecamatan Baregbeg, Pasai Ikan Banagara Kecamatan Ciamis, Pasar Ikan Kecamatan Cihaurbeuti, Pasar Ikan Kecamatan Panumbangan dan Pasar Ikan Cileungsir Kecamatan Rancah.

- ✓ Sentra Fokus Pengembangan,
 - Sentra pengembangan Ikan Gurame di Panumbangan, Panjalu, Ciamis, Baregbeg, Cikoneng, Sindangkasih, Rajadesa, Banjarsari, Panjalu dan Cijeungjing;
 - Sentra Ikan Nila di Cijeungjing, Panumbangan, Kawali, Cipaku, Sadananya, Cisaga, Banjarsari, Ciamis dan Cihaurbeuti;
 - Sentra pengembangan lele di Cikoneng, Sidangkasih, Sadananya dan Banjarsari;
 - Sentra Udang Galah di Pamarican, Panumbangan dan Sidangkasih.

Permintaan komoditas hasil peternakan dan perikanan mengalami peningkatan permintaan seiring dengan cepatnya laju pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan perkapita serta kecenderungan perubahan pola makan yang ditandai dengan bertambahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya produk hewani asal ternak dan ikan sebagai salah satu bahan makanan yang bergizi tinggi.

Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Kabupaten Ciamis, pemasaran hasil produk peternakan terbuka luas, karena letak Kabupaten Ciamis yang strategis berbatasan langsung dengan kota Cilacap, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, dekat dengan kota besar Bandung, Cirebon dan Jakarta serta menguntungkan karena kualitas ternak dan ikan dari Kabupaten Ciamis dapat bersaing dengan produk peternakan dan perikanan dari daerah lain.

Sumber daya manusia (peternak dan pembudidaya ikan) memegang peranan yang sangat penting, sehingga harus memiliki pengetahuan yang luas tentang pemeliharaan, perawatan, pembibitan/pembenihan bahkan sampai dengan pemasaran hewan ternak dan ikan. Peternak juga harus memahami kebutuhan hewan ternak, seperti pakan hijauan, konsentrat dan kesehatannya. Demikian halnya dengan pembudidaya ikan harus memahami kebutuhan perikanan seperti ketersediaan air, pakan dan kesehatan.

Adapun faktor utama penunjang peternakan dan perikanan diantaranya, hewan ternak dan ikan, lingkungan sekitar, introduksi teknologi dan sarana prasarana. Ternak dan ikan merupakan objek,

untuk itu perlu adanya perhatian lebih dari petani ternak/ikan sehingga dapat berkembang dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Lingkungan di sekitar harus diperhatikan baik itu perkandangan/kolam ataupun analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan. Teknologi yang berkembang saat ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ternak dan ikan, menekan ongkos produksi pemeliharaan, menjaga ketersediaan pakan dan menjaga sumber air dari kekeringan di musim kemarau. Sarana dan prasarana merupakan alat dan mesin penunjang peternakan, sehingga pemeliharaan/budidaya dapat efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu agar memberikan hasil yang lebih optimal.

Isu - isu strategis berdasarkan tupoksi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis antara lain :

1. Ketersediaan Sumberdaya Manusia Peternakan dan Perikanan yang berkualitas;
2. Ketersediaan indukan yang berkualitas;
3. Harga pakan ternak dan ikan semakin meningkat;
4. Penyerapan informasi pasar dan teknologi masih rendah;
5. Degradasi lahan peternakan dan perikanan yang potensial;
6. Daya saing hasil produksi peternakan dan perikanan masih rendah;
7. Sarana prasarana pendukung usaha peternakan dan perikanan belum memadai;
8. Pengendalian Penyakit Hewan dan Ikan Belum Optimal;

Kontribusi Produksi Peternakan dan Perikanan Terhadap Pemenuhan Gizi Masyarakat Sangat Dominan.

I.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 82 tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan pemerintahan kelautan perikanan sub urusan perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan sebagian urusan kelautan dan perikanan sub urusan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- 2) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan sub urusan di bidang peternakan perikanan sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sub urusan di bidang peternakan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelola keuangan, kepegawaian dan umum.
- 3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
 - f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan penyelenggaran bahan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pengelolaan perlengkapan Dinas;
 - e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
 - f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - g. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
 - h. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- j. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan

- 1) Bidang Produksi, Prasarana dan Saran Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, perencanaan, fasilitasi dan peningkatan kapasitas sumber daya, pengembangan dan penyebaran ternak, pengelolaan dan pengendalian produksi dan mutu produksi ternak, fasilitasi pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana peternakan, serta pembinaan usaha peternakan.
- 3) Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan kegiatan bidang produksi, prasarana dan sarana peternakan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perbibitan, budidaya dan pakan ternak;
 - c. penyusunan petunjuk, teknis, penyebaran dan pengembangan ternak;
 - d. penyusunan petunjuk teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternakan;
 - e. penyusunan petunjuk teknis pengembangan prasarana dan sarana peternakan;
 - f. penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha peternakan;
 - g. fasilitasi dan pembinaan permodalan serta kemitraan usaha;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi.

4. Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran

- 1) Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan petunjuk teknis, pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan.
- 3) Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan bidang kesehatan hewan, ikan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengendalian penyakit hewan dan ikan;
 - c. penyusunan petunjuk teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. penyusunan petunjuk teknis pengawasan peredaran obat/vaksin/sera dan produk biologis lainnya;
 - e. penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan kesehatan hewan, ikan dan masyarakat veteriner;
 - g. penyusunan petunjuk teknis, pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak, produk ikan dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten serta sertifikasi kesehatan hewan dan bahan asal hewan yang keluar masuk wilayah kabupaten;
 - h. penyusunan petunjuk teknis, pelayanan kesehatan hewan, ikan medik/paramedik;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan

- 1) Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan.
- 3) Bidang pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan;
 - b. Pembinaan dan fasilitasi penerapan teknologi pembenihan, budidaya, penebaran, dan penangkapan ikan;
 - c. Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan pembenih, pembudidaya, nelayan perairan umum dan kelompok masyarakat pengawas perikanan;
 - d. pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pembenihan budidaya ikan;
 - e. pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana penebaran dan penangkapan ikan di perairan umum;
 - f. pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya perikanan;
 - g. pembinaan dan fasilitasi perijinan usaha budidaya dan penangkapan ikan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2018, Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) UPTD Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Ciamis, Kelas A;
 - b. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Panumbangan, Kelas A;
 - c. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Kawali, Kelas A;
 - d. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Rancah, Kelas A;
 - e. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Banjarsari, Kelas A;
 - f. UPTD Perbibitan Ternak dan Perbenihan Ikan, Kelas A; dan
 - g. UPTD Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan Kelas A.
- 2) UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

1) Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah

- 1) Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang peternakan dan perikanan dan/atau kegiatan penunjang dinas.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan kegiatan UPTD;
 - b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana

- ketatausahaan UPTD;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan pembudidayaan perikanan dan pengembangan peternakan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Kepala UPTD Perbibitan Ternak dan Perbenihan Ikan

1. Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf f mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pembibitan bibit ternak dan pengembangan benih ikan dan/atau kegiatan penunjang dinas.
2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan kegiatan UPTD;
 - b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan UPTD;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan pengembangan bibit ternak dan pengembangan benih ikan
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;

- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala UPTD Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan

- 1) Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf g mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pemeriksaan Kesehatan hewan, baik sebelum dipotong (*ante mortem*) maupun setelah dipotong (*post mortem*), pengambilan specimen penyakit hewan dan pemungutan retribusi.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan kegiatan UPTD;
 - b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan UPTD;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, baik sebelum dipotong (*ante mortem*) maupun setelah dipotong (*post mortem*), pengambilan specimen penyakit hewan dan pemungutan retribusi;
 - d. pelaksana kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- 4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja
- 5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PERENCANAAN KINERJA

II.1 VISI DAN MISI

II.1.1 VISI

Visi merupakan tujuan pembangunan jangka panjang yang ingin dicapai lima tahun mendatang dari sebuah organisasi. Visi harus berorientasi ke depan, mengekspresikan kreatifitas, berdasarkan prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat dan tidak berdasarkan kondisi saat ini. Selain itu, visi harus mempertimbangkan kondisi daerah setempat, permasalahan pembangunan, tantangan yang akan dan sedang dihadapi serta isu-isu strategis pembangunan daerah.

Visi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis harus sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Ciamis. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, visi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dituangkan dalam rumusan sebagai berikut: **“Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera untuk Semua”**.

Dengan demikian maka makna dari visi tersebut adalah

- Menjadikan Ciamis sebagai sentra pangan hewani dari semua komoditi pangan hewani seperti ternak besar, ternak kecil dan unggas dengan fokus komoditi unggulan ternak sapi, kambing/domba dan unggas terutama ayam buras, itik, ikan gurame, ikan emas, ikan nila, lele, udang galah dan ikan lainnya pada tahun 2023. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis bersama SKPD lain akan menggerakkan potensi lokal misalnya dalam penyediaan bahan baku pakan ternak dan ikan. Kebijakan strategis yang akan ditempuh bersama berupa peningkatan produktivitas komoditas ternak, ikan, penanganan kesehatan hewan/ikan dan pengamanan produk pangan asal ternak dan ikan agar produksi sesuai dengan standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
- Terwujudnya sentra pangan asal ternak dan ikan akan memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Sektor riil akan bergerak, peluang usaha

pendukung peternakan dan perikanan baik hulu maupun hilir akan terbuka sehingga pertumbuhan perekonomian akan bergerak naik

- Pertumbuhan perekonomian akan berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Asupan protein hewani asal ternak dan ikan yang baik terhadap anak sekolah akan meningkatkan kecerdasan dalam menempuh pendidikannya, disamping itu dapat pula meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

II.1.2 MISI

Misi merupakan strategi yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun strategi tersebut dijabarkan melalui misi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

- Misi 1 Meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM peternakan dan perikanan
- Misi 2 Meningkatkan kuantitas produksi peternakan dan perikanan yang berwawasan lingkungan
- Misi 3 Mengembangkan jaringan kemitraan agribisnis peternakan dan perikanan
- Misi 4 Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan, ikan dan kesehatan masyarakat veteriner

Makna yang terkandung dari misi tersebut adalah

1. Meningkatkan kualitas dan Produktivitas SDM Peternakan dan Perikanan

Makna yang terkandung dalam misi 1 adalah dalam rangka mengembangkan agribisnis diperlukan peningkatan kualitas dan produktivitas SDM Peternakan dan Perikanan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

2. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil peternakan dan Perikanan yang berwawasan lingkungan

Makna yang terkandung dalam Misi 2 adalah untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil peternakan dan perikanan perlu adanya teknologi yang ramah lingkungan, kemampuan manajerial dari pelaku yang

difasilitasi oleh aparatur pemerintah yang profesional, sehingga memiliki daya saing di pasar regional, nasional dan global

3. Mengembangkan jaringan kemitraan agribisnis peternakan dan perikanan

Makna yang terkandung dalam Misi 3 adalah untuk mengembangkan agribisnis diperlukan peran serta banyak pihak sebagai pelaku usaha, satu sama lain saling terkait dalam pola kemitraan yang saling menguntungkan, proposional dan adil

4. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan, ikan dan kesehatan masyarakat veteriner

Makna yang terkandung dalam Misi 4 adalah untuk mewujudkan ketentraman masyarakat diperlukan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan yang bersifat *zoonosis*

II.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang akan dicapai dan bersifat idealistik, mengandung keinginan kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut, perlu ditetapkan tujuan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait.

Tujuan, sasaran dan strategi mencapainya dari masing-masing Misi dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM peternakan dan perikanan

Tujuan yang ingin dicapai adalah mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan menghasilkan produksi peternakan dan perikanan yang berkualitas

Sasaran (1) yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah terlayannya kepentingan masyarakat di bidang peternakan dan perikanan, dan tersedianya aparatur peternakan dan perikanan yang profesional

Sasaran (2) yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha agribisnis peternakan dan perikanan

Misi 2 : Meningkatkan kuantitas produksi peternakan dan perikanan yang berwawasan lingkungan

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan ketersediaan pangan hewani dan pemenuhan pasar hasil peternakan dan perikanan.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatnya volume produk unggulan, budidaya dan sarana prasarana peternakan dan perikanan yang berwawasan lingkungan

Misi 3 : Mengembangkan jaringan kemitraan agribisnis peternakan dan perikanan

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pengembangan usaha dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan melalui pola kemitraan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah berkembangnya jaringan pemasaran, volume dan nilai transaksi serta kemitraan usaha agribisnis peternakan dan perikanan

Misi 4 : Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan sistem pengendalian penyakit hewan, ikan menular dan Kesmavet

Sasaran (1) yang ingin dicapai adalah meningkatnya rasa aman dan tentram masyarakat dari penyakit hewan dan ikan

Sasaran (2) yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi ternak dan ikan yang sehat dan berkualitas

Sasaran (3) yang ingin dicapai adalah menurunnya penyakit hewan dan ikan yang bersifat *zoonosis*

II.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

II.3.1 STRATEGI

Strategi untuk mencapai Misi 1 adalah melalui kebijakan:

1. Meningkatkan pelayanan aparatur peternakan dan perikanan yang profesional
2. Meningkatkan SDM pelaku agribisnis peternakan dan perikanan
3. Meningkatkan bimbingan teknis peternakan dan perikanan

Strategi untuk mencapai Misi 2 adalah melalui kebijakan:

1. Memberikan bimbingan dan fasilitasi dalam budidaya peternakan dan perikanan
2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan
3. Mengembangkan teknik budidaya peternakan dan perikanan yang ramah lingkungan

Strategi untuk mencapai Misi 3 adalah melalui kebijakan:

1. Pengembangan promosi hasil peternakan dan perikanan
2. Memfasilitasi berkembangnya jaringan kemitraan agribisnis Peternakan dan perikanan

Strategi untuk mencapai Misi 4 adalah melalui kebijakan:

1. Memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat mengenai kesehatan hewan, ikan dan kesehatan masyarakat veteriner

II.3.2 KEBIJAKAN

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur peternakan dan perikanan dalam pelayanan, melalui program Administrasi Perkantoran;
2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan, melalui program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatkan pendidikan dan latihan peternakan dan perikanan melalui program peningkatan kapasitas

- sumberdaya aparatur;
4. Meningkatkan evaluasi kinerja melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 5. Memberikan bimbingan dan fasilitasi dalam budidaya peternakan dan perikanan, melalui program peningkatan produksi hasil peternakan dan perikanan;
 6. Meningkatkan SDM pelaku usaha agribisnis peternakan dan perikanan dengan memfungsikan kelembagaan ekonomi masyarakat peternakan, melalui program peningkatan kesejahteraan petani;
 7. Mengembangkan teknik budidaya perternakan dan perikanan yang ramah lingkungan, melalui program peningkatan penerapan teknologi peternakan dan perikanan, melalui program pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya;
 8. Pengembangan promosi hasil peternakan dan perikanan melalui program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
 9. Memfasilitasi berkembangnya jalinan kemitraan, melalui program peningkatan agribisnis;
 10. Meningkatkan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang sinergis, melalui program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak;
 11. Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui peningkatan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal;
 12. Perluasan lapangan kerja sub sektor peternakan dan perikanan yang berbasis agribisnis yang berdaya saing;
 13. Mendorong produktivitas usaha;
 14. Meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk industri berbahan baku lokal/komponen lokal;

II.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel. 1. Perjanjian Kinerja 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah	1. Level Maturitas SPIP 2. Hasil Evaluasi AKIP 3. Kualitas Pelaporan Keuangan	3 BB 750	Nilai Nilai Nilai
2. Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,55	Nilai
3. Meningkatnya produksi peternakan yang sehat dan berkualitas	1. Jumlah produksi daging 2. Jumlah produksi telur	127.574 14.160	Ton Ton
4. Meningkatnya produksi perikanan yang sehat dan berkualitas	1. Jumlah produksi perikanan tangkap 2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	785,66 25.499,80	Ton Ton
5. Meningkatnya Kesejahteraan pelaku usaha peternak dan perikanan	NTP (Nilai Tukar Petani)	112,95	Indeks
6. Berkembangnya jaringan pemasaran serta kemitraan usaha agribisnis peternakan dan perikanan	Jumlah jaringan kemitraan	18	Kelompok

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2023 didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. Program dan Kegiatan 2023

No	Anggaran	No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	APBD Kab. Urusan	1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.473.880.000
		2	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	114.510.000
		3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	813.400.000
		4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.925.324.000
		5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	50.000.000
		6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.639.700.000
2	APBD Kab. Non Urusan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.379.634.698
Jumlah				18.396.449.098

III. AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Target dan Realisasi Tahun 2023

Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 dapat diukur berdasarkan target dan realisasi sasaran strategis, diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah melalui: level maturitas SPIP target nilai 3 dengan realisasi nilai 3,431 atau persentase capaian 114,37%, Hasil evaluasi AKIP target nilai BB (70,00) dengan realisasi nilai B (67,1) atau persentase capaian 95,86%, dan kualitas pelaporan keuangan target nilai 750 dengan realisasi nilai 721,10 atau persentase capaian 96,15%.
2. Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dari target nilai 85,55, realisasi nilai 85,22 atau persentase pencapaian target sebesar 99,61%.
3. Meningkatnya produksi peternakan yang sehat dan berkualitas, dengan jumlah produksi daging dari target 125.574 ton, realisasi 149.135 ton atau persentase pencapaian target sebesar 118,76%, dan jumlah produksi telur dari target 14.160 ton, realisasi 31.246 ton atau persentase pencapaian target sebesar 220,66%.
4. Meningkatnya produksi perikanan yang sehat dan berkualitas, dengan jumlah produksi perikanan tangkap dari target 785,659 ton, realisasi 300,12 ton atau persentase pencapaian target sebesar 38,20%, dan jumlah produksi perikanan budidaya dari target 25.499,80 ton, realisasi 26.361,06 ton atau persentase mencapai 103,38%.
5. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha peternakan dan perikanan, dari target indeks 112,95, realisasi indeks 112,95 atau persentase pencapaian target sebesar 100%.

6. Berkembangnya jaringan pemasaran serta kemitraan usaha agribisnis peternakan dan perikanan, dari target 18 kelompok, realisasi 20 kelompok atau persentase sebesar 111,11%.

b. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2022

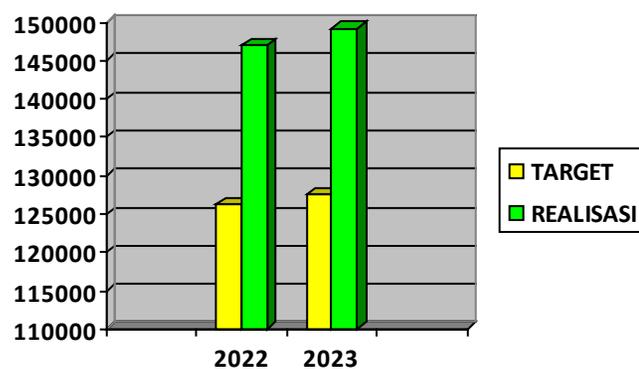
1) Produksi Peternakan

Hasil Produksi peternakan yaitu daging dan telur. Daging yang dihasilkan dari daging sapi, kerbau, domba, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik. Telur yang dihasilkan terdiri dari telur ayam buras, ayam ras petelur, dan itik. Adapun realisasi produksinya sebagai berikut :

- Produksi Daging

Target produksi komoditas daging tahun 2023 sebanyak 125.574 ton dengan realisasi produksi mencapai 149.135 ton atau persentase pencapaian sebesar 118,76%. Secara kumulatif dapat dilihat perbandingan realisasi produksi daging tahun 2022 dan tahun 2023 yang mana ada kenaikan produksi daging sebesar 23.561 ton seperti pada Gambar 1. dibawah ini.

Gambar 1. Realisasi Produksi Daging Tahun 2022 dan 2023

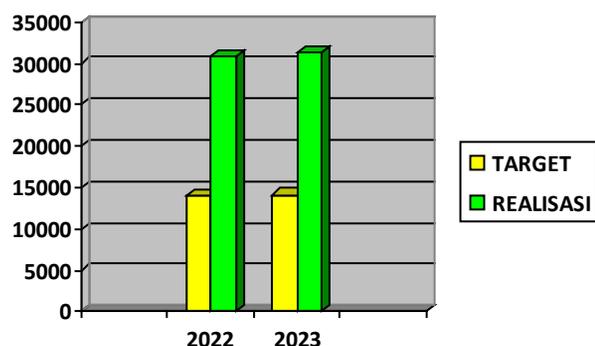


- Produksi Telur

Target produksi komoditas telur tahun 2023 sebanyak 14.160 ton dengan realisasi produksi mencapai 31.246 ton atau persentase pencapaian sebesar 220,66%. Secara kumulatif dapat dilihat perbandingan realisasi produksi telur tahun 2022 dan tahun 2023 yang mana ada

kenaikan produksi telur sebesar 17.086 ton seperti pada Gambar 2. dibawah ini.

Gambar 2. Realisasi Produksi Telur Tahun 2022 dan 2023



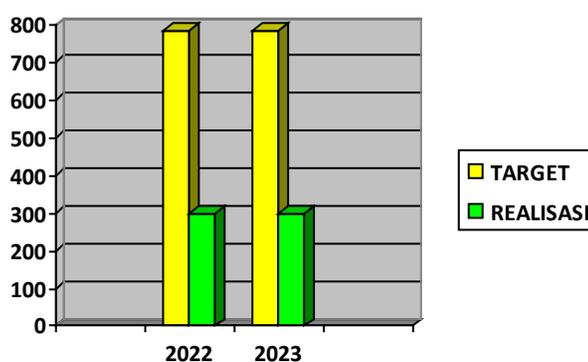
a. Produksi Perikanan

Hasil Produksi Perikanan terdiri dari Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya. Produksi Perikanan Tangkap meliputi ikan Betok, ikan Nila, ikan Gabus, ikan Nilem, ikan Sepat rawa, Ikan Mas, Ikan Tawes, ikan Lalawak, ikan Baung, ikan Patin, Lobster. Produksi Perikanan Budidaya meliputi udang galah, ikan Mas, ikan Nila, ikan Gurame, ikan Patin, ikan Lele dan ikan lainnya. Adapun realisasi produksinya sebagai berikut :

- Produksi Perikanan Tangkap

Target produksi komoditas ikan tangkap tahun 2023 sebanyak 785,65 ton dengan realisasi produksi mencapai 300,12 ton atau persentase pencapaian sebesar 38,19%. Secara kumulatif dapat dilihat perbandingan realisasi produksi ikan tahun 2022 dan tahun 2023 seperti pada Gambar 3. dibawah ini.

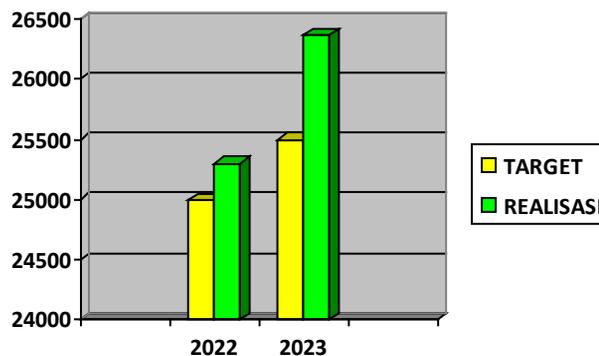
Gambar 3. Realisasi Produksi Ikan Tangkap Tahun 2022 dan 2023



- Produksi Perikanan Budidaya

Target produksi komoditas ikan budidaya tahun 2023 sebanyak 25.499,80 ton dengan realisasi produksi mencapai 26.361,06 ton atau persentase pencapaian sebesar 103,38%. Secara kumulatif dapat dilihat perbandingan realisasi produksi ikan tahun 2022 dan tahun 2023 seperti pada Gambar 4. dibawah ini.

Gambar 4. Realisasi Produksi Ikan Budidaya Tahun 2022 dan 2023



c. Analisis Permasalahan dan Solusi Pencapaian Target Kinerja

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2023 beserta solusinya dapat dilihat dari tabel 3. dibawah ini :

Tabel 3. Permasalahan dan Solusi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2023

NO	MASALAH	SOLUSI
1	Masih terbatasnya teknologi terkait budidaya yang sampai ke tangan pembudidaya ikan/pokdakan.	- Kerjasama dengan perguruan tinggi ataupun institusi yang kompeten dalam peningkatan kapasitas SDM petugas dan pembudidaya ikan antara lain melalui pembimbingan, aplikasi teknologi dan kaji terap.
2	Tidak tersedianya tenaga/SDM guna terselenggaranya pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Diklat teknis
3	Kurang tersedianya prasarana dan sarana rantai dingin guna menjaga kualitas hasil produksi. Masih kurangnya SDM pelaku usaha yang menguasai tentang pengolahan dan pemasaran.	Mengajukan usulan pembiayaan kegiatan ke tingkat provinsi maupun tingkat pusat serta mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi dalam hal rantai dingin. Pelatihan yang masif dan terencana.
4	Belum adanya pola penyalenggaraan terkait penyediaan dan pengembangan sarana pertanian yang efektif dan efisien.	Melaksanakan penataan program/kegiatan terkait penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
5	Belum adanya pola penyalenggaraan terkait penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian yang efektif dan efisien.	Melaksanakan penataan program/kegiatan terkait penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
6	Masih kurangnya sarana penunjang kelancaran kegiatan.	- Penyediaan Pos kesehatan hewan di lokasi-lokasi sentra/potensial. - Penyediaan sarana mobilitas (Mobil Pelayanan Keliling). - Pemenuhan kebutuhan SDM yang memadai.

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja dan Capaian Sasaran Strategis

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023, Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki 2 urusan yaitu :

1. Urusan Pertanian Sub Urusan Peternakan

Urusan Pertanian sub Urusan Peternakan terdiri dari 3 Program, 7 Kegiatan, dan 7 Sub Kegiatan yaitu :

- *Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian :*
 1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :
 - 1.1 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
 - 1.2 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 2. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, meliputi sub kegiatan :
 - 2.1 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- *Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian :*
 1. Pembangunan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan :
 - 1.1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- *Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner :*
 1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
 - 1.1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :
 - 2.1 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
 3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi sub kegiatan:

3.1 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan, meliputi sub kegiatan :

4.1 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

- *Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian*

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian mendukung kepada realisasi pencapaian target kinerja pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, diantaranya adalah target produksi daging, target produksi telur.

Meningkatnya Produksi Ternak yang Sehat dan Berkualitas

- *Produksi Daging*

Tabel 4. Target dan Realisasi Produksi Daging Tahun 2023

Komoditas	2023		
	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)
Produksi Daging	127.574	149.135	118,76

Berdasarkan Tabel 4. diatas, dapat dilihat bahwa realisasi produksi daging tahun 2023 dengan capaian kumulatif sebesar 118,76%. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh semakin meningkatnya produksi dari komoditas daging terutama daging unggas. Bahkan untuk komoditas ayam ras petelur peningkatan produksi dagingnya mencapai 175,21% dari target tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh populasi dari ayam ras petelur di Kabupaten Ciamis yang meningkat cukup signifikan dan banyaknya para peternak baru ayam ras petelur. Untuk komoditas ayam ras pedaging yang produksinya mengalami peningkatan mencapai 115,53% dari target tahun 2023. Peningkatan produksi daging ayam ras pedaging ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Adanya introduksi teknologi dalam pemeliharaan ternak seperti penggunaan kandang *close house*;
- Permintaan pasar terhadap bobot hidup mengalami peningkatan dari 0,8 kg menjadi 1,3 kg;
- Kualitas pakan semakin baik sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan ayam;
- Efisiensi waktu produksi (bobot 1,3 kg biasa dicapai dalam 33 hari menjadi 28 hari);
- Kualitas genetik DOC semakin baik;
- Keseragaman produksi atau pertumbuhan ayam lebih bagus;
- Manajemen pemeliharaan yang semakin baik (vaksinasi, vitamin dan kebersihan kandang), sehingga ayam terhindar dari penyakit dan stress.

Sedangkan untuk komoditas dari ternak ruminansia besar (ternak sapi dan kerbau) ternak sapi potong sesuai target tahun 2023, hanya untuk komoditas kerbau dibawah target 2023 yaitu hanya mencapai 89,71%. Hal ini dipengaruhi oleh semakin berkurangnya populasi ternak kerbau di Kabupaten Ciamis. Salah satu penyebabnya adalah tergantikannya fungsi utama kerbau untuk membajak lahan pertanian (sawah) oleh penggunaan mesin traktor. Untuk Ternak ruminansia kecil (ternak domba dan kambing) mengalami penurunan yang cukup besar yaitu ternak domba 45,28% dan ternak kambing 19,83% yang disebabkan oleh penurunan parameter Unreg domba dan kambing sesuai dengan Surat dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Nomor 524.8/81/perenc, tanggal 15 Januari 2020 perihal perubahan parameter unregister pemotongan domba dan kambing. Sehingga jumlah produksi daging domba dan kambing menurun sedangkan jumlah populasi ternak domba dan kambing menjadi meningkat.

- *Produksi Telur*

Target produksi komoditas telur tahun 2023 sebanyak 14.160 ton dengan realisasi produksi mencapai 31.246 ton atau persentase pencapaian sebesar 220,66%. Secara kumulatif dapat dilihat perbandingan realisasi produksi telur tahun 2022 dan tahun 2023 yang mana ada kenaikan produksi telur sebesar 17.086 ton.

2. Urusan Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan

Urusan Pertanian sub Urusan Peternakan terdiri dari 3 Program, 4 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan yaitu:

- *Program Pengelolaan Perikanan Budidaya*
 1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, meliputi sub kegiatan :
 - 1.1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.3 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
- *Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*
 1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :
 - 1.1 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
- *Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan*
 1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, meliputi sub kegiatan :

- 1.1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :
 - 2.1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Produksi Perikanan yang Sehat dan Berkualitas

Hasil Produksi Perikanan terdiri dari Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya. Produksi Perikanan Tangkap meliputi ikan Betok, ikan Nila, ikan Gabus, ikan Nilem, ikan Sepat rawa, Ikan Mas, Ikan Tawes, ikan Lalawak, ikan Baung, ikan Patin, Lobster. Produksi Perikanan Budidaya meliputi udang galah, ikan Mas, ikan Nila, ikan Gurame, ikan Patin, ikan Lele dan ikan lainnya.

- *Produksi Perikanan Tangkap*

Target produksi komoditas ikan tangkap tahun 2023 sebanyak 785,659 ton dengan realisasi produksi mencapai 300,12 ton atau persentase pencapaian sebesar 38,19%. Target dan realisasi produksi ikan tangkap berdasarkan komoditas ikannya Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 5. dibawah ini.

Tabel 5. Target dan Realisasi Produksi Ikan Tangkap Tahun 2023

Komoditas	2023		
	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	785,659	300,12	38,19

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi produksi ikan tahun 2023 dengan capaian kumulatif sebesar 38,19%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pembudidaya ikan di masyarakat dan sarana prasarana penunjang yang terus diperbaiki seperti pasar ikan serta semakin bertambahnya pembangunan UPR setiap tahunnya.

Masalah yang ditemui pada tahun 2023 adalah serangan penyakit akibat adanya fluktuasi suhu dan curah hujan yang tidak menentu, pencemaran limbah industri dan limbah rumah tangga yang menyebabkan kualitas perairan menurun serta menurun drastis populasi ikan di perairan umum. Strategi pemecahan persoalan diatas dengan cara bekerja sama dengan penyuluh lapangan untuk segera melakukan pengobatan, memberikan sosialisasi kepada pembudidaya ikan agar mengantisipasi dan mengatur pemasukan air ke kolam ikan, bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi dan pengelolaan limbah serta melaksanakan *restocking* di perairan umum.

- *Produksi Perikanan Budidaya*

Target produksi komoditas ikan budidaya tahun 2023 sebanyak 25.499,80 ton dengan realisasi produksi mencapai 26.361,06 ton atau persentase pencapaian sebesar 103,38%. Target dan realisasi produksi ikan tangkap berdasarkan komoditas ikannya Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 6. dibawah ini.

Tabel 6. Target dan Realisasi Produksi Ikan Budidaya Tahun 2023

Jenis Komoditas	Total		
	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	25.499,80	26.361,06	103,38

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi produksi ikan tahun 2023 dengan capaian kumulatif sebesar 103,38%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pembudidaya ikan di masyarakat dan sarana prasarana penunjang yang terus diperbaiki seperti pasar ikan serta semakin bertambahnya pembangunan UPR setiap tahunnya.

Masalah yang ditemui pada tahun 2023 adalah serangan penyakit akibat adanya fluktuasi suhu dan curah hujan yang tidak menentu, pencemaran limbah industri dan limbah rumah tangga yang menyebabkan kualitas perairan menurun serta menurun drastis populasi ikan di perairan umum. Strategi pemecahan persoalan diatas dengan cara bekerja sama dengan penyuluh lapangan untuk segera melakukan pengobatan, memberikan sosialisasi kepada pembudidaya ikan agar mengantisipasi dan mengatur pemasukan air ke kolam ikan, bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi dan pengelolaan limbah serta melaksanakan restocking di perairan umum.

III.2 REALISASI ANGGARAN

III.2.1 REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 untuk Urusan pilihan pembangunan Peternakan dan Perikanan dilaksanakan melalui 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.10.016.814.400,00, realisasi keuangan sebesar Rp.9.572.661.990,00 atau mencapai 95,57%, ada sisa anggaran sebesar Rp. 444.152.410,00. Adapun rincian program adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.925.324.400,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

3.690.897.300,00 atau mencapai 94,03% ada sisa anggaran sebesar Rp. 234.427.100,00 dan realisasi fisik mencapai 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 277.528.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 273.156.900,00 atau mencapai 98,42% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah Populasi Ternak Ayam Buras (Balai Perbibitan) sebanyak 800 ekor dan jumlah Populasi Ternak Sapi Potong sebanyak 61 ekor (Balai Perbibitan).
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 357.576.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 262.515.900,00 atau mencapai 73,42% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah Populasi Ternak Ayam Buras (Balai Perbibitan) sebanyak 800 ekor dan jumlah Populasi Ternak Sapi Potong sebanyak 61 ekor (Balai Perbibitan).
- Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.290.220.400,00, realisasi keuangan sebesar Rp.3.115.225.400,00 atau mencapai 95,90% ada sisa anggaran sebanyak Rp. 134.995.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah pedet hasil IB sebanyak 979 ekor dan jumlah

DOC (Balai Perbibitan Ayam Buras) sebanyak 14.300 ekor.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.000.000,00 atau mencapai 94,00% ada sisa anggaran sebesar Rp.3.000.000,00 dan realisasi fisik mencapai 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp.50.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.47.000.000,00 atau mencapai 94,00% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah Peningkatan prasarana peternakan sebanyak 2 paket.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.639.700.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.593.816.840,00 atau mencapai 97,20%, ada sisa anggaran sebesar Rp. 45.883.160,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 280.100.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 234.819.240,00 atau mencapai 83,83% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah kejadian penyakit zoonosis pada hewan sebanyak 1 kasus.

- Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dengan jumlah anggaran Rp.759.990.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.755.512.600,00 atau mencapai 99,94%. dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah kejadian penyimpangan Pangan Asal Hewan dan Ikan (PAHI) sebanyak 2 kasus.
 - Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan dengan jumlah anggaran Rp. 110.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 110.000.000,00 atau mencapai 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah Jumlah Pelaku Usaha Pasca Panen sebanyak 5 kelompok.
 - Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan dengan jumlah anggaran Rp.493.610.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.493.485.000,00 atau mencapai 99,97% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah pelaku usaha juru sembelih yang mengikuti bimbingan teknis sebanyak 50 orang.
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.473.880.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.332.741.200,00 atau mencapai 95,94%. Dalam program ini ada sisa anggaran sebesar Rp. 141.139.000,00 dengan

realisasi fisik mencapai 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, meliputi sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 46.600.000,00, atau mencapai 93,20% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah Jumlah Produksi Calon Induk dan Benih Ikan sebanyak 861.800.000 ekor.
 - 2) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.225.590.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.115.727.200,00 atau mencapai 96,59% ada sisa anggaran sebesar Rp. 109.862.800,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah Jumlah Produksi Calon Induk dan Benih Ikan sebanyak 861.800.000 ekor.
 - 3) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.198.290.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.170.413.800,00 atau mencapai 85,94% ada sisa anggaran sebesar Rp. 27.876.200,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah Jumlah Produksi Calon Induk dan Benih Ikan sebanyak 861.800.000 ekor.
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.141.510.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.94.904.000,00 atau mencapai 82,88% ada sisa anggaran sebesar Rp. 19.606.000,00 dengan realisasi fisik 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan :

- 1) Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp.141.510.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.94.904.000,00 atau mencapai 82,88% ada sisa anggaran sebesar Rp. 19.606.000,00 dengan realisasi fisik 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah Jumlah Kelompok Masyarakat Perikanan sebanyak 4 kelompok.

6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (Dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.813.400.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.813.302.850,00 atau mencapai 99,99% ada sisa anggaran sebesar Rp. 97.150,00 dengan realisasi fisik 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, meliputi Sub Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala dengan jumlah anggaran sebesar Rp.338.375.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.338.375.000,00 atau mencapai 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan sebanyak 10 Kelompok.

- Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan :

- 1) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp.475.025.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.474.927.850,00 atau mencapai 99,98% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah Jumlah Pelaku Usaha Perikanan sebanyak 10 kelompok.

Adapun Kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan Non Urusan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8.379.634.698,00 realisasi keuangan sebesar Rp.7.632.957.251,00 atau mencapai 91,09%, ada sisa anggaran sebesar Rp. 746.677.447,00 dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.049.800,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 28.965.000,00 atau mencapai 72,32% ada sisa anggaran sebesar Rp.11.084.800,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sebanyak 10 Dokumen.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,00 atau mencapai 100,00% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sebanyak 10 Dokumen.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,00 atau mencapai 100,00% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah Jumlah dokumen

- perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sebanyak 10 Dokumen.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,00 atau mencapai 100,00% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sebanyak 10 Dokumen.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 4.887.500,00 atau mencapai 100,00% ada sisa anggaran sebesar Rp.112.500,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sebanyak 10 Dokumen.
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau mencapai 100,00% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sebanyak 10 Dokumen.
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau mencapai 100,00% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sebanyak 10 Dokumen.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.968.863.598,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 5.390.437.927,00 atau mencapai 90,31% ada sisa anggaran sebesar Rp. 578.425.671,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja

- keluaran kegiatannya adalah jumlah laporan administrasi keuangan sebanyak 2 dokumen.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.5.000.000,00 atau mencapai 100,00% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah laporan administrasi keuangan sebanyak 2 dokumen.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.15.000.000,00 atau mencapai 100,00% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah laporan administrasi keuangan sebanyak 2 dokumen.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.7.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.3.800.000,00 atau mencapai 54,29% ada sisa anggaran sebesar Rp. 3.200.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah waktu penyediaan kelengkapan administrasi umum sebanyak 12 bulan.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 73.550.500,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 70.691.500,00 atau mencapai 96,11% ada sisa anggaran sebesar Rp. 2.859.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah waktu penyediaan kelengkapan administrasi umum sebanyak 12 bulan.
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 36.570.000,00 atau mencapai 91,43% ada sisa anggaran sebesar Rp. 3.430.000,00 dengan realisasi fisik

mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah waktu penyediaan kelengkapan administrasi umum sebanyak 12 bulan.

- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.293.600,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 11.422.700,00 atau mencapai 49,04% ada sisa anggaran sebesar Rp. 11.870.900,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah waktu penyediaan kelengkapan administrasi umum sebanyak 12 bulan.
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.252.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.247.200.000,00 atau mencapai 98,10% ada sisa anggaran sebesar Rp. 4.800.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah waktu penyediaan kelengkapan administrasi umum sebanyak 12 bulan.
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 233.460.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 219.4886.811,00 atau mencapai 94,01% ada sisa anggaran sebesar Rp.13.973.189,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah waktu penyediaan kelengkapan administrasi umum sebanyak 12 bulan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan :
 - 1) Pengadaan Mebel, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.12.125.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.7.000.000,00 atau mencapai 57,73% ada sisa anggaran sebesar Rp. 5.125.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah barang yang tersedia sebanyak 1 Paket.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.90.925.200,00, realisasi keuangan sebesar Rp.87.942.413,00 atau mencapai 96,72% ada sisa anggaran sebesar Rp. 2.982.787,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebanyak 12 bulan.
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 932.750.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 932.750.000,00 atau mencapai 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebanyak 12 bulan.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.402.030.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.362.713.400,00 atau mencapai 90,22% ada sisa anggaran sebesar Rp. 39.316.600,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah sebanyak 12 bulan.
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 30.700.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 13.990.000,00 atau mencapai 45,57% ada sisa anggaran sebesar Rp. 16.710.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah sebanyak 12 bulan.

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.212.887.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.160.100.000,00 atau mencapai 75,20% ada sisa anggaran sebesar Rp. 52.787.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah sebanyak 12 bulan.

III.2.2 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18, bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Adapun sumber PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 berasal dari hasil retribusi daerah yang terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah (pasar ikan dan pasar ternak) serta retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dengan rincian tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7. Target Penerimaan PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2023

Uraian	Vol.	Satuan	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
Hasil Sewa BMD				34.000.000
• Pasar Ikan Imbanagara	1	tahun	6.000.000	6.000.000
• Pasar Ikan Cihaurbeuti	1	tahun	6.000.000	6.000.000
• Pasar Ikan Golat Panumbangan	1	tahun	6.000.000	6.000.000
• Pasar Ikan Maleber	1	tahun	7.000.000	7.000.000
• Pasar Ikan Banjarsari	1	tahun	3.000.000	3.000.000
• Pasar Ikan Kawali	1	tahun	6.000.000	6.000.000
Retribusi Pelataran				
• Pasar Hewan	1	tahun	26.956.000	26.956.000
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)				32.225.000
• RPH Ciamis	729	ekor	25.000	17.000.000
• RPH Banjarsari	560	ekor	25.000	15.225.000
Jumlah				93.181.000

Berdasarkan Tabel 7. Retribusi pemakaian kekayaan daerah Pasar Ikan Imbanagara merupakan yang terbesar dibandingkan dengan pasar ikan yang lainnya dikarenakan volume penjualan di tempat tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pasar ikan lainnya. Sedangkan untuk retribusi pasar ikan Banjarsari dengan target terendah dikarenakan pasar ikan Banjarsari operasionalnya belum berjalan secara optimal dan masih dalam proses penambahan/pembangunan sarana dan prasarana.

Besaran penerimaan retribusi RPH berasal dari RPH Ciamis dan RPH Banjarsari dengan target 2023 pemotongan sebanyak 1.289 ekor dengan retribusi yang dikenakan sebesar Rp.25.000/ekor.

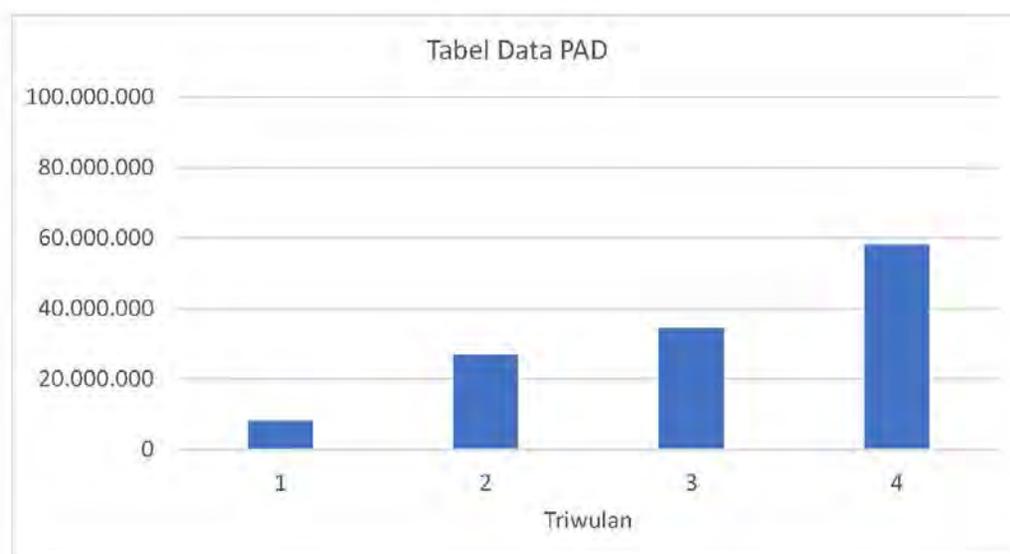
Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 06 Tahun 2012 tentang Restribusi Rumah Potong Hewan (RPH), adapun untuk pasar hewan dan ikan didasarkan pada Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Pihak Kepala Disnakan dan Pengelola pasar). PAD Tahun 2023 untuk Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis sampai 31 Desember 2023 ditargetkan sebesar Rp. 93.181.000,00. Target PAD tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan PAD tahun 2022. Realisasi PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2022 mencapai Rp. 95.781.000,00 atau 100%. Artinya tidak memenuhi target yang telah ditetapkan pada DPA 2023. Hal ini terjadi karena menurunnya tingkat pemotongan ternak di Kabupaten Ciamis, masih adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) yang mengakibatkan penurunan aktivitas di Pasar Ternak dan Ikan serta RPH. Realisasi penerimaan PAD Tahun 2023 tersaji pada Tabel 8. berikut ini.

Tabel 8. Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2023

Retribusi Per Triwulan	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)	Retribusi Pelataran	Sumbangan Pihak Ketiga	Jumlah	%
a. Triwulan I	4.450.000	2.500.000	1.200.000	8.150.000	8,75
b. Triwulan II	7.700.000	1.900.000	9.100.000	18.700.000	28,15
c. Triwulan III	2.800.000	2.200.000	2.500.000	7.500.000	36,86
d. Triwulan IV	1.300.000	5.800.000	16.600.000	23.700.000	62,30
Jumlah	16.250.000	12.400.000	29.400.000	58.050.000	62,30

Berdasarkan Tabel 8. dapat dianalisis penerimaan PAD pada setiap triwulan mengalami penurunan, terutama pada triwulan IV yang mencapai 62,30% dari target PAD tahun 2023. Penurunan penerimaan PAD per triwulan tersaji pada Gambar 5. dibawah ini.

Gambar 5. Data Penerimaan PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2023



Penerimaan PAD setiap triwulannya menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini didorong oleh bertambahnya pemotongan di RPH, meningkatnya aktivitas jual beli di pasar hewan dan pasar ikan. Pengoptimalan dan peningkatan sarana prasarana serta kemampuan petugas pemungut retribusi daerah merupakan salah satu cara yang dinilai efektif dalam peningkatan penerimaan PAD. Faktor penting lainnya dalam penerimaan PAD ini adalah adanya peningkatan konsumsi daging dan ikan seiring dengan semakin membaiknya perekonomian pada triwulan IV tahun 2023 sehingga daya beli masyarakat terhadap komoditas peternakan (daging) dan ikan meningkat.

III.2.3 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Belanja Daerah

Guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Konsekuensi logis dari pelaksanaan kedua undang-undang ini memberikan pengaruh perubahan terhadap tata laksana manajemen keuangan di daerah baik dari proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja Pemerintah Daerah maka penyusunan anggaran kinerja sangat diperlukan dalam penyusunan APBD. Penyusunan anggaran berbasis kinerja akan memberikan penetapan ukuran atau indikator keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan dari suatu organisasi Pemerintah Daerah sesuai visi, misi dan tujuannya yang telah ditetapkan. Mekanisme penganggaran yang baik melalui siklus perencanaan anggaran dan penyesuaiannya terhadap struktur APBD merupakan proses yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran serta diperlukan kerjasama yang baik antara para legislatif dan birokrasi.

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil (*outcome/output*) dengan tidak menyampingkan prinsip-prinsip anggaran yakni transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran. Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor penting dan menentukan dan keseluruhan siklus anggaran daerah.

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

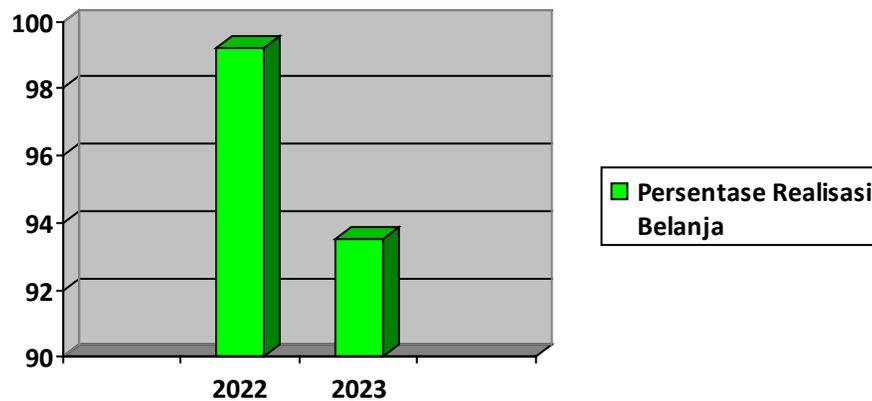
Anggaran Belanja Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2022 sebesar Rp. 19.354.332.917,00. Realisasi Belanja Daerah secara keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 19.203.948.795,00 atau mencapai 99,22%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.150.384.122,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar Rp. 18.396.449.098,00. Realisasi Belanja Daerah secara keseluruhan sampai dengan 29 Desember 2023 sebesar Rp. 17.205.619.241,00 atau

mencapai 93,53%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.190.829.857,00.

Capaian realisasi belanja tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan capaian realisasi belanja tahun 2022. seperti tersaji pada Gambar 6. dibawah ini.

Gambar 6. Persentase Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2023



a) Belanja Pegawai

Jumlah anggaran belanja pegawai Tahun 2023 sebesar Rp. 5.968.863.598,00, dengan realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 5.390.437.927,00 atau mencapai 90,31%, dengan sisa anggaran Rp. 578.425.671,00.

b) Belanja Barang dan Jasa

Jumlah anggaran belanja barang dan jasa Tahun 2023 sebesar Rp. 6.425.556.500,00, dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 5.932.373.914,00 atau mencapai 92,32%, dengan sisa anggaran Rp.493.182.586,00.

c) Belanja Modal

Jumlah anggaran belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp. 337.529.000,00, dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 323.307.400,00 atau mencapai 95,79%, dengan sisa anggaran Rp. 14.221.600,00.

Realisasi dan sisa anggaran tersaji pada Tabel 9. sebagai berikut :

Tabel 9. Realisasi Belanja Langsung

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	5.968.863.598	5.390.437.927	578.425.671
2	Belanja Barang & Jasa	6.425.556.500	5.932.373.914	493.182.586
3	Belanja Modal	337.529.000	323.307.400	14.221.600

IV. PENUTUP

Penyusunan LAKIP tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis bersumber dari retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Ciamis dan Banjarsari sebesar Rp. 32.225.000,00. Retribusi Pasar Hewan Ciamis, Rancah, Rajadesa, Panjalu, Lakbok, Pamarican, Banjarsari, Purwadadi) sebesar Rp. 26.956.000,00. Retribusi enam Pasar Ikan (Imbanagara, Cihaurbeuti, Golat, Maleber, Banjarsari dan Kawali) sebesar Rp. 34.000.000,00. Jumlah total keseluruhan PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 93.181.000,00. Adapun realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp. 58.050.000,00 atau mencapai 62,30%.

Berdasarkan sumber anggarannya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Pencapaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	APBD Kab. Non Urusan	1 Program 6 Kegiatan 23 Sub Kegiatan	8.379.634.698	7.632.957.251	91,09	746.677.447
2	APBD Kab. Urusan Pilihan	6 Program 11 Kegiatan 15 Sub Kegiatan	10.016.814.400	9.572.661.990	95,57	444.152.410
3	APBD Prov.	3 Program 4 Kegiatan	PM	PM	100	-
4	APBN	4 Program 7 Kegiatan	PM	PM	100	-

Sisa anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi tahun 2023 yang berasal dari efisiensi sisa kontrak.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar Rp. 18.396.449.098,00. Realisasi Belanja Daerah secara keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.

17.205.619.241,00 atau mencapai 93,52%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.190.829.857,00.

PAD Tahun 2023 untuk Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis sampai 29 Desember 2023 ditargetkan sebesar Rp. 93.181.000,00. Target PAD tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan PAD tahun 2022. Realisasi PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mencapai Rp. 58.050.000,00 atau mencapai 62,30%.

Capaian realisasi produksi ternak dan ikan di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, sehingga dapat memenuhi target Perjanjian Kinerja 2023. Prestasi ini membanggakan dan akan terus ditingkatkan sesuai dengan target Perjanjian Kinerja tahun berikutnya. Terutama untuk kooditas unggulan seperti daging, telur, ikan nila dan ikan mas. Selain itu, kedepan sarana dan prasarana untuk mendukung produksi ternak dan budidaya ikan akan ditambah guna menunjang peningkatan produksi dan produktivitas ternak dan ikan sehingga akan berdampak langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan di Kabupaten Ciamis.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis melaksanakan pembinaan dan memberikan dorongan kepada para peternak dan pembudidaya ikan untuk mengikuti perlombaan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah baik tingkat provinsi maupun pusat. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi peternak dan pembudidaya ikan agar lebih kreatif dan mampu bersaing dengan peternak dari daerah lain.

LAMPIRAN

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2023
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIAMIS

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah	1. Level Maturitas SPIP	3 nilai	3,43	114,37	
		2. Hasil Evaluasi AKIP	BB nilai	BB	100,00	
		3. Kualitas Pelaporan Keuangan	750 nilai	721,10	96,15	
2.	Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,55 nilai	85,22	99,61	
3.	Meningkatnya produksi peternakan yang sehat dan berkualitas	1. Jumlah produksi daging	127.574 ton	149.135	116,90	
		2. Jumlah produksi telur	14.160 ton	31.246	220,66	
4.	Meningkatnya produksi perikanan yang sehat dan berkualitas	1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	785,659 ton	300,12	38,20	
		2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	25.499,80 ton	26.361,06	103,38	
5.	Meningkatnya Kesejahteraan pelaku usaha peternak dan perikanan	NTP (Nilai Tukar Petani)	112,95 indeks	112,95	100,00	
6.	Berkembangnya jaringan pemasaran serta kemitraan usaha agribisnis peternakan dan perikanan	Jumlah jaringan kemitraan	18 kelompok	20	111,11	

Ciamis, Januari 2024
 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN CIAMIS



Dr. G. RATNO, S.I.P., M.Si
 0730813 200212 1 003

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2023
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.473.880.000	3.332.741.000	95,94	
Indikator Output Program :				
Jumlah produksi perikanan budidaya	25.499,80	26.060,94	102,20	
Satuan Indikator : Ton				
Kegiatan :				
1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.473.880.000	3.332.741.000	95,94	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah produksi perikanan budidaya	861.800.000	821.613.063	95,34	
Satuan Indikator : ekor				
Sub kegiatan :				
1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	46.600.000	93,20	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100	
Satuan indikator : Dokumen				
2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.225.590.000	3.115.727.200	96,59	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	5	100	
Satuan indikator : unit				
3. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	198.290.000	170.413.800	85,94	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10	10	100	
Satuan indikator : orang				
2. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	114.510.000	94.904.000	82,88	
Indikator Output Program :				
Cakupan lokasi perikanan tangkap yang diawasi	4	4	100	
Satuan Indikator : lokasi				
Kegiatan :				
1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	114.510.000	94.904.000	82,88	
Indikator Output Kegiatan :				
Cakupan Lokasi Perikanan Tangkap yang Diawasi	4	4	100	
Satuan Indikator : lokasi				
Sub Kegiatan :				
1. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	114.510.000	94.904.000	82,88	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1	1	100	
Satuan indikator : Dokumen				
3. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	813.400.000	813.302.850	99,99	
Indikator Output Program :				
Persentase kelompok yang meningkat usahanya	5	5	100,00	
Satuan indikator : %				
Kegiatan :				
1. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	338.375.000	338.375.000	100,00	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan	10	10	100	
Satuan indikator : Kelompok				
Sub Kegiatan :				
1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	338.375.000	338.375.000	100	

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5	5	100	
Satuan indikator : Unit Usaha				
2. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	475.025.000	474.927.850	99,98	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah Pelaku Usaha Perikanan	5	5	100	
Satuan indikator : Orang				
Sub Kegiatan :				
1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	475.025.000	474.927.850	99,98	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.000	2.000	100	
Satuan indikator : Ton				
4. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.925.324.400	3.690.897.300	94,03	
Indikator Output Program :				
Persentase peningkatan produktivitas peternakan	1,5	1,5	100	
Satuan indikator : %				
Kegiatan :				
1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	635.104.000	535.671.900	84,34	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras (Balai Perbibitan)	900	900	100	
Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong (Balai Perbibitan)	61	61	100	
Satuan indikator : Ekor				
Sub Kegiatan :				
1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	277.528.000	273.156.900	98,42	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1	1	100	
Satuan indikator : VUB				
2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	357.576.000	262.515.000	73,42	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4	4	100	
Satuan indikator : dokumen				
2. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lain	3.290.220.400	3.155.225.400	95,90	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah DOC (Balai Perbibitan Ayam Buras)	14.300	14.300	100	
Jumlah Pedet Hasil IB	979	979	100	
Satuan indikator :Ekor				
1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.290.220.400	3.155.225.400	95,90	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	10.000	10.000	100,00	
Satuan indikator : ekor				
5. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	50.000.000	47.000.000	94,00	
Indikator Output Program :				
Presentase prasarana pertanian yang dibangun	20	20	100	
Satuan indikator : %				
Kegiatan :				
1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	50.000.000	47.000.000	94,00	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah Peningkatan Prasarana Peternakan	2	2	100	
Satuan indikator : Paket				
Sub kegiatan :				
1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	50.000.000	47.000.000	94,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5	5	100	
Satuan indikator : Unit				
6. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.639.700.000	1.593.816.840	97,20	
Indikator Output Program :				
Prosentase penurunan kasus penyakit hewan yang bersifat zoonosis	100	100	100	
Satuan indikator : %				
Kegiatan :				
1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	280.100.000	234.819.240	83,83	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah Kejadian Penyakit Zoonosis Pada Hewan	1	1	100	
Satuan indikator : Kasus				
Sub kegiatan :				
1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	280.100.000	234.819.240	83,83	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1	1	100	
Satuan indikator : laporan				
2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	755.990.000	755.512.600	99,94	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah Kejadian Penyimpangan Pangan Asal Hewan dan Ikan (PAHI)	2	2	100	
Satuan indikator : Kasus				
Sub kegiatan :				
1. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	755.990.000	755.512.600	99,94	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1	1	100	
Satuan indikator : laporan				
3. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	110.000.000	110.000.000	100	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah Pelaku Usaha Pasca Panen	25	25	100	
Satuan indikator : Kelompok				
Sub kegiatan :				
1. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	110.000.000	110.000.000	100	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1	1	100	
Satuan indikator : laporan				
4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	493.610.000	493.485.000	99,97	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah Pelaku Usaha Juru Sembelih yang mengikuti Bimbingan Teknis	50	50	100	
Satuan indikator : Orang				
Sub kegiatan :				
1. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	493.610.000	493.485.000	99,97	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1	1	100	
Satuan indikator : laporan				
7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.379.634.698	7.632.957.251	91,09	
Indikator Output Program :				
Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	87,16	102,54	
Satuan Indikator : %				
Indikator Output Program :				
Hasil evaluasi AKIP	BB	BB	100,00	
Satuan Indikator : Nilai				
Indikator Output Program :				
Maturitas SPIP perangkat daerah	3	3,00	100,00	
Satuan Indikator : Nilai				

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.049.800	68.852.500	86,01	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	10	10	100,00	
Satuan Indikator : Dokumen				
Sub kegiatan :				
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.049.800	28.965.000	72,32	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100	
Satuan Indikator : Dokumen				
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100	
Satuan Indikator : Dokumen				
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100	
Satuan Indikator : Dokumen				
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100	
Satuan Indikator : Dokumen				
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	4.887.500	97,75	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100	
Satuan Indikator : Dokumen				
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	100	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	100	
Satuan Indikator : Dokumen				
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100	
Satuan Indikator : Dokumen				
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.988.863.598	5.410.437.927	90,34	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah laporan administrasi keuangan	2	2	100,00	
Satuan Indikator : Dokumen				
Sub kegiatan :				
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.968.863.598	5.390.437.927	90,31	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah gaji dan tunjangan ASN	12	12	100	
Satuan Indikator : Bulan				
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	100	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	
Satuan Indikator : laporan				
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000	100	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	1	100	
Satuan Indikator : laporan				
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	629.304.100	589.171.011	93,62	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah waktu penyediaan kelengkapan administrasi umum	12	12	100,00	
Satuan Indikator : bulan				
Sub kegiatan :				
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	3.800.000	54,29	

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	100	
Satuan Indikator : paket				
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.550.500	70.691.500	96,11	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	100	
Satuan Indikator : paket				
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	36.570.000	91,43	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100	
Satuan Indikator : paket				
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.293.600	11.422.700	49,04	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	100	
Satuan Indikator : paket				
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	252.000.000	247.200.000	98,10	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5	5	100	
Satuan Indikator : Dokumen				
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.460.000	219.486.811	94,01	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	100	
Satuan Indikator : laporan				
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.125.000	7.000.000	57,73	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah barang yang tersedia	1	1	100	
Satuan Indikator : paket				
Sub kegiatan :				
1. Pengadaan Mebel	12.125.000	7.000.000	57,73	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	4	100	
Satuan Indikator : paket				
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.023.675.200	1.020.692.413	99,71	
Sub kegiatan :				
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	100	
Satuan Indikator : bulan				
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.925.200	87.942.413	96,72	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100	
Satuan Indikator : laporan				
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	932.750.000	932.750.000	100	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100	
Satuan Indikator : laporan				
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	645.617.000	536.803.400	83,15	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah	12	12	100	
Satuan Indikator : bulan				
Sub kegiatan :				
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	402.030.000	362.713.400	90,22	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin / berkala	66	66	100	
Satuan Indikator : Unit				
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.700.000	13.990.000	45,57	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15	100	

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
Satuan Indikator : Unit				
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	212.887.000	160.100.000	75,20	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	100	
Satuan Indikator : Unit				

Ciamis, Januari 2024
 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN CIAMIS



Dr. GIYATNO, S.IP. M.Si
 NIP. 19730813 200212 1 003